

LAMPIRAN

Tabel 4. 1 Perbandingan Peraturan Investasi Asing dalam Myanmar Foreign Investment Law Tahun 1988 dan New Foreign Investment Law Tahun 2012¹¹⁹

	Myanmar Investment Law 1988	Myanmar Investment Law tahun 2012
Perusahaan dan Investasi yang Diizinkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% perusahaan lokal; atau 2. <i>Joint venture</i> antara investor asing dan perusahaan Myanmar (termasuk organisasi pemerintah) – investor asing diharuskan memiliki setidaknya 35% dari modal keseluruhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% perusahaan asing yang mendapat izin dari MIC 2. <i>Joint ventures</i> antara investor asing dan perusahaan Myanmar dengan penghilangan pembagian modal 3. Struktur tertentu yang disetujui di bawah <i>joint venture agreement</i>

¹¹⁹ Duffield, Alistair, Ken Cheung, and Nomita Nair. 2012. "Myanmar The New Foreign Investment Law - An analysis." *Berwin Leighton Paisner*

	Myanmar Investment Law 1988	Myanmar Investment Law tahun 2012
Pembagian Modal	<p>1. US\$500,000 untuk perusahaan industri di mana US\$170.000 dalam bentuk tunai dan US\$330.000 dapat berupa material, mesin, dan perlengkapan lainnya.</p> <p>2. US\$300.000 untuk perusahaan jasa atau services</p>	<p>MIC memiliki kebijaksanaan untuk mengenakan pembagian modal asing minimum dalam kerja sama bisnis yang menguntungkan dari investasi asing</p>

	Myanmar Investment Law 1988	Myanmar Investment Law tahun 2012
Aktifitas-aktifitas yang Dilarang	<p>State Economic Enterprises Law menyebutkan 12 aktifitas di bawah <i>State sector</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi kayu jati dan penjualan dalam dan luar negeri 2. Budidaya dan konservasi tanaman hutan 3. Eksplorasi, ekstraksi, dan penjualan minyak bumi dan gas alam 4. Eksplorasi dan ekstraksi mutiara dan batu mulia 5. Perkawinan dan produksi ikan dan udang di wilayah penelitian 6. Pos dan telekomunikasi 7. Jasa transportasi udara dan kereta api 8. Perbankan dan asuransi 9. Penyiaran dan televisi 10. Eksplorasi dan ekstraksi logam 11. Pembangkit listrik 12. Industri manufaktur terkait keamanan dan pertahanan. 	<p>Klausul 4: Daftar sektor bisnis yang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agrikultur, perikanan, perkawinan ternak, sektor produksi dan jasa 2. Bisnis yang merusak lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat 3. Bisnis yang berjarak 10 mil dari perbatasan internasional apa pun kecuali untuk area yang didesain sebagai zona ekonomi 4. Bisnis yang memproduksi limbah beracun dan zat kimia berbahaya

	Myanmar Investment Law 1988	Myanmar Investment Law tahun 2012
Jaminan Investasi	Pemerintah menjamin tidak ada bisnis asing yang akan dinasionalisasi selama periode kontrak	Jaminan investasi diperpanjang untuk menjangkau periode perpanjangan apa pun yang disetujui oleh MIC Pemerintah menjamin bahwa perusahaan ekonomi yang dibentuk di bawah izin dari MIC tidak akan diberhentikan sebelum periode yang diizinkan tanpa ada keadaan tertentu yang dapat dipercaya (<i>reliable circumstances</i>)
Penyelesaian Sengketa	Tidak dijelaskan	Mengizinkan dilakukannya penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat

	Myanmar Investment Law 1988	Myanmar Investment Law tahun 2012
Penalti atas Pelanggaran terhadap FIL	Tidak dijelaskan	<p>Penalti merupakan kebijakan dari MIC dan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan 2. Pemberhentian keringanan pajak sementara 3. Pencabutan izin usaha 4. <i>Black listing business</i> 5. Investor mungkin dapat dikenakan secara kriminal karena memberikan dokumen palsu terkait informasi finansial atau karyawan

Tabel 4. 2 Jenis Perusahaan yang Memerlukan MIC Permit dan MIC Approval¹²⁰

MIC Permit	MIC Approval
<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Bussiness (Akan didefinisikan) 2. Bisnis dengan modal besar (akan ditentukan) 3. Bisnis dengan dampak besar bagi lingkungan dan habitat lokal 4. Bisnis yang memerlukan MIC Permit sebagaimana ditentukan oleh MIC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisnis yang membutuhkan persetujuan untuk menggunakan lahan negara. 2. Investor yang mencari <i>tax incentives</i>

¹²⁰ Vanderbruggen, E. (2016). *What Changes in Practice under the New Investment Law?* Yangon: VDB Loi. Hlm. 3